



e-ISSN 2798-8260



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 6, No 1, 2026, Page: 1-9

# Peran Budaya Organisasi dalam Mendorong Inovasi Birokrasi Sektor Publik

Syafriandi<sup>1\*</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3582>

\*Correspondence: Syafriandi

Email: [syafriandi017@gmail.com](mailto:syafriandi017@gmail.com)

Received: 03-04-2026

Accepted: 12-05-2026

Published: 28-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *This article aims to analyze research trends and conceptual developments in public service innovation and governance in Indonesia through a literature review supported by bibliometric analysis. The study employs a narrative literature review combined with a bibliometric analysis of 548 scholarly articles published during the 2020–2025 period, sourced from national and international academic databases. Bibliometric analysis was conducted using VOSviewer to map publication patterns, author collaboration networks, and thematic research clusters. The findings reveal that research has predominantly focused on public service digitalization, bureaucratic innovation, technology-based governance, and community participation as well as multi-stakeholder collaboration. However, the results also indicate persistent challenges, including limited policy integration, disparities in human resource capacity, and digital infrastructure gaps. This article emphasizes the importance of strengthening bureaucratic leadership, policy synergy, and citizen engagement to achieve adaptive and sustainable governance.*

**Keywords:** *Public Service Innovation; Governance; Bibliometric Analysis; Digital Governance; Public Administration.*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian serta perkembangan konsep inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia melalui pendekatan kajian literatur berbantuan analisis bibliometrik. Penelitian ini menggunakan metode literature review naratif yang dipadukan dengan analisis bibliometrik terhadap 548 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2020–2025, diperoleh dari basis data jurnal nasional dan internasional. Analisis bibliometrik dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan pola publikasi, jaringan kolaborasi penulis, serta kluster tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus kajian didominasi oleh isu digitalisasi pelayanan publik, inovasi birokrasi, tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, serta partisipasi dan kolaborasi multipihak. Meskipun demikian, temuan juga mengindikasikan masih terbatasnya integrasi antar kebijakan, ketimpangan kapasitas sumber daya manusia, serta kesenjangan infrastruktur digital sebagai tantangan utama dalam implementasi inovasi. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan kepemimpinan birokrasi, sinergi kebijakan, dan pelibatan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Inovasi Pelayanan Publik; Tata Kelola Pemerintahan; Analisis Bibliometrik; Digital Governance; Administrasi Publik.

## Pendahuluan

Transformasi birokrasi sektor publik merupakan agenda strategis yang terus menguat seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, transparan, dan inovatif. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta kompleksitas permasalahan publik mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, tidak hanya pada aspek struktural dan prosedural, tetapi

juga pada dimensi nilai dan perilaku aparatur negara (Sumantri, 2022; Ariska et al., 2023). Dalam konteks tersebut, budaya organisasi menjadi elemen fundamental yang memengaruhi cara birokrasi merespons perubahan dan tuntutan publik. Budaya yang adaptif dan berorientasi pada kinerja diyakini mampu memperkuat kapasitas birokrasi dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang relevan dan berdampak nyata (Tratama & Haryani, 2021).

Budaya organisasi dalam sektor publik merujuk pada sistem nilai, norma, dan keyakinan bersama yang membentuk pola pikir serta perilaku aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karakteristik birokrasi yang hierarkis dan regulatif sering kali membentuk budaya kerja yang cenderung administratif dan berorientasi pada kepatuhan, sehingga berpotensi menghambat inovasi jika tidak dikelola secara tepat (Lestari et al., 2024; Ulum & Oktariyanda, 2021). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang menekankan pembelajaran, kolaborasi, dan keterbukaan terhadap perubahan justru dapat menjadi katalisator inovasi birokrasi (Wardani & Rahayu, 2021; Suhendra & Hartopo, 2022). Kepemimpinan yang visioner dan internalisasi nilai organisasi yang kuat turut berperan dalam menciptakan iklim kerja yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik (Nursanty et al., 2022; Chisnullah & Meirinawati, 2022).

Inovasi birokrasi sendiri dipahami sebagai pengenalan ide, praktik, atau mekanisme baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik (Wiryanto, 2021; Wardani & Ardhiarisca, 2022). Inovasi tersebut mencakup berbagai sektor strategis, seperti administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan publik, dengan fokus pada peningkatan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Setyawan & Rahmawati, 2023; Yulistivira et al., 2023). Seiring berkembangnya teknologi digital, inovasi birokrasi semakin diarahkan pada pemanfaatan sistem elektronik dan layanan berbasis digital untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akuntabilitas (Wulandari et al., 2023; Wardani et al., 2024). Kondisi ini mempertegas pentingnya budaya organisasi yang mendukung perubahan dan inovasi secara berkelanjutan.

Secara kuantitatif, publikasi ilmiah yang terindeks di Google Scholar dengan kata kunci seperti budaya organisasi, inovasi birokrasi, dan sektor publik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kajian-kajian tersebut mengangkat beragam fokus, mulai dari kepemimpinan inovatif, digitalisasi pelayanan publik, hingga akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan (Asmawati et al., 2024; Oktawiana & Handayani, 2024). Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial dan kontekstual, dengan fokus pada studi kasus tertentu tanpa mengaitkannya dalam kerangka konseptual yang lebih luas (Atikasari & Karsinah, 2022). Akibatnya, pemahaman mengenai pola, tema dominan, serta arah perkembangan penelitian tentang peran budaya organisasi dalam inovasi birokrasi masih terfragmentasi dan belum tersintesis secara komprehensif (Asniati et al., 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian yang bersifat konseptual, khususnya terkait belum adanya pemetaan dan sintesis tematik yang terstruktur mengenai hubungan antara budaya organisasi dan inovasi birokrasi sektor publik. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren perkembangan penelitian, kluster tema

utama, serta arah kajian melalui pendekatan literature review naratif berbantuan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer. Kontribusi artikel ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik secara konseptual, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumus kebijakan dan pimpinan birokrasi dalam merancang strategi pengembangan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan (Syahrial & Ananto, 2022; Yulistivira et al., 2023).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review naratif yang diperkaya dengan analisis bibliometrik untuk memetakan perkembangan kajian mengenai peran budaya organisasi dalam mendorong inovasi birokrasi sektor publik. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai pola, tren, dan struktur keilmuan yang berkembang dalam literatur, sekaligus mengidentifikasi keterkaitan antartema penelitian secara sistematis. Literature review naratif memungkinkan peneliti melakukan interpretasi kritis terhadap temuan-temuan utama, sementara analisis bibliometrik berfungsi sebagai alat pendukung untuk memperkuat objektivitas pemetaan pengetahuan.

Sumber data penelitian diperoleh dari Google Scholar, mengingat basis data ini mencakup spektrum publikasi ilmiah yang luas, termasuk artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan konteks sektor publik. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci, antara lain “budaya organisasi”, “inovasi birokrasi”, dan “sektor publik”, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Publikasi yang dianalisis mencakup artikel jurnal ilmiah yang terbit dalam rentang waktu tertentu dan memiliki keterkaitan langsung dengan tema budaya organisasi dan inovasi dalam konteks pemerintahan atau administrasi publik.

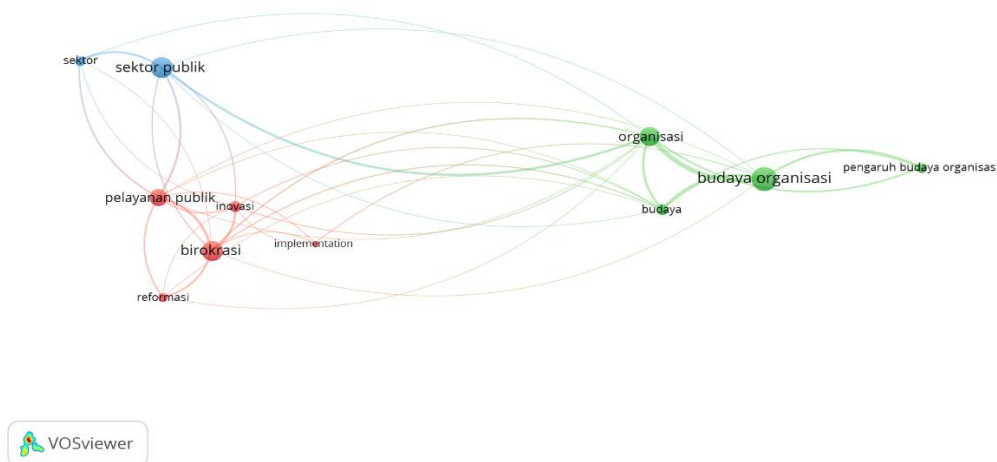
Data bibliografis yang diperoleh dari hasil penelusuran kemudian diekstraksi dalam format yang kompatibel untuk dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Analisis bibliometrik dilakukan melalui pemetaan co-occurrence kata kunci, jaringan keterkaitan antarpenulis, serta kluster tema penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi topik-topik dominan, hubungan konseptual antarkajian, serta dinamika perkembangan penelitian dari waktu ke waktu. Visualisasi jaringan yang dihasilkan oleh VOSviewer membantu dalam mengungkap struktur intelektual dan arah penelitian yang berkembang dalam bidang ini.

Selanjutnya, hasil analisis bibliometrik diinterpretasikan secara naratif dengan mengaitkan temuan visual dan statistik dengan isi substantif dari literatur yang relevan. Tahap ini bertujuan untuk menyintesis tema-tema utama, mengidentifikasi celah konseptual, serta menilai kontribusi dan keterbatasan kajian terdahulu. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menghasilkan pemetaan kuantitatif berbasis data bibliografis, tetapi juga analisis kualitatif yang mendalam terhadap substansi penelitian.

Melalui kombinasi pendekatan naratif dan bibliometrik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan kajian peran budaya organisasi dalam mendorong inovasi birokrasi sektor publik. Metode ini sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan implikasi konseptual dan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan dan reformasi birokrasi yang berorientasi pada inovasi.

## Hasil dan Pembahasan

Analisis bibliometrik terhadap 548 publikasi ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar menghasilkan peta jejaring kata kunci (co-occurrence) yang divisualisasikan menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Peta ini menunjukkan struktur konseptual penelitian mengenai peran budaya organisasi dalam mendorong inovasi birokrasi sektor publik. Berdasarkan visualisasi jaringan, kata kunci yang muncul membentuk beberapa kluster utama yang saling terhubung, mencerminkan fokus, kecenderungan, dan keterkaitan tema penelitian yang berkembang dalam literatur.



**Gambar 1. Network Visualization Kata Kunci. Penelitian Inovasi Pelayanan Publik (2020–2025)**

*Sumber: Diolah tim peneliti, 2025*

Kluster pertama ditandai dengan dominasi kata kunci *“budaya organisasi”*, *“organisasi”*, dan *“pengaruh budaya organisasi”*. Kluster ini menunjukkan bahwa budaya organisasi menjadi konsep sentral dalam kajian inovasi birokrasi sektor publik. Keterkaitan yang kuat antara budaya organisasi dan organisasi secara umum mengindikasikan bahwa sebagian besar penelitian menempatkan budaya sebagai variabel penentu dalam membentuk perilaku aparatur, pola kerja, serta kesiapan organisasi publik dalam menghadapi perubahan. Hal ini menegaskan posisi budaya organisasi sebagai fondasi konseptual dalam pengembangan inovasi birokrasi.

Kluster kedua berfokus pada kata kunci *“birokrasi”*, *“pelayanan publik”*, *“inovasi”*, dan *“reformasi”*. Kluster ini merepresentasikan orientasi penelitian yang menekankan inovasi sebagai instrumen reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterhubungan yang intens antara inovasi dan pelayanan publik menunjukkan bahwa inovasi birokrasi umumnya dikaji dalam konteks perbaikan kinerja layanan, efisiensi administrasi, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini mencerminkan kecenderungan literatur yang bersifat aplikatif dan berorientasi pada hasil kebijakan publik.

Selain itu, klaster ketiga memperlihatkan keterkaitan antara “*sektor publik*” dengan tema birokrasi dan organisasi. Posisi kata kunci sektor publik yang menjembatani klaster budaya organisasi dan klaster inovasi birokrasi menunjukkan bahwa penelitian di bidang ini bersifat lintas tema dan tidak berdiri secara terpisah. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa inovasi birokrasi dalam sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh aspek struktural dan regulatif, tetapi juga oleh faktor kultural yang melekat dalam organisasi pemerintahan. Dengan demikian, inovasi dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara budaya organisasi, konteks birokrasi, dan dinamika sektor publik.

Secara keseluruhan, hasil visualisasi bibliometrik menunjukkan bahwa penelitian mengenai budaya organisasi dan inovasi birokrasi sektor publik masih terpusat pada tema-tema utama tertentu dan belum sepenuhnya mengarah pada sintesis konseptual yang integratif. Keterhubungan antarklaster yang relatif kuat mengindikasikan potensi pengembangan kajian yang lebih holistik, khususnya dalam mengaitkan budaya organisasi dengan implementasi inovasi dan dampaknya terhadap reformasi birokrasi. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pembahasan lebih lanjut mengenai arah perkembangan penelitian dan peluang penguatan kerangka konseptual di masa mendatang.

## Diskusi

Hasil analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer menunjukkan bahwa kajian mengenai peran budaya organisasi dalam mendorong inovasi birokrasi sektor publik berkembang secara signifikan dan membentuk beberapa klaster tematik utama. Klaster pertama didominasi oleh konsep birokrasi, pelayanan publik, reformasi, dan inovasi, yang mencerminkan fokus penelitian pada upaya pembaruan tata kelola pemerintahan dalam merespons tuntutan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari inovasi pelayanan publik sebagai instrumen peningkatan kinerja dan legitimasi pemerintah (Sumantri, 2022; Wiryanto, 2021). Inovasi birokrasi diposisikan sebagai respons adaptif terhadap kompleksitas permasalahan publik, terutama dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan sektor strategis lainnya (Ariska et al., 2023; Wardani & Rahayu, 2021).

Klaster kedua memperlihatkan keterkaitan kuat antara budaya organisasi, organisasi publik, dan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja inovasi. Hal ini menegaskan bahwa budaya organisasi berperan sebagai fondasi nilai dan norma yang membentuk perilaku aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan dan layanan publik. Budaya yang hierarkis dan prosedural, sebagaimana umum dijumpai dalam birokrasi, sering kali menjadi kendala bagi inovasi apabila tidak diimbangi dengan nilai keterbukaan dan pembelajaran organisasi (Lestari et al., 2024; Ulum & Oktariyanda, 2021). Sebaliknya, budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, kepercayaan, dan orientasi pada hasil terbukti mampu menciptakan iklim inovatif yang berkelanjutan (Wardani & Rahayu, 2021; Suhendra & Hartopo, 2022).

Keterkaitan antara budaya organisasi dan inovasi birokrasi juga tercermin dalam berbagai studi empiris yang menekankan peran kepemimpinan, akuntabilitas, dan tata kelola yang adaptif. Penelitian di bidang akuntansi sektor publik dan manajemen

pemerintahan menunjukkan bahwa nilai-nilai organisasi seperti integritas, amanah, dan transparansi berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik (Asniati et al., 2023; Costari & Belinda, 2021; Nursanty et al., 2022). Dalam konteks ini, budaya organisasi tidak hanya berfungsi sebagai faktor internal, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Syahrial & Ananto, 2022).

Hasil pemetaan juga memperlihatkan meningkatnya perhatian penelitian terhadap inovasi berbasis teknologi digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi. Studi-studi mengenai implementasi sistem informasi pemerintahan daerah, layanan digital kependudukan, serta pelayanan publik berbasis aplikasi menunjukkan bahwa inovasi digital berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan (Asmawati et al., 2024; Setyawan & Rahmawati, 2023; Wulandari et al., 2023). Namun demikian, keberhasilan inovasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan budaya organisasi, terutama dalam hal penerimaan perubahan, kompetensi aparatur, dan komitmen pimpinan (Wardani et al., 2024; Frinaldi et al., 2024).

Dalam perspektif yang lebih luas, sejumlah penelitian mutakhir menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam mendorong inovasi birokrasi yang berkelanjutan. Inovasi tidak lagi dipahami semata sebagai produk internal organisasi pemerintah, melainkan sebagai hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara. Studi mengenai sanitasi berbasis masyarakat, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta pemberdayaan komunitas menunjukkan bahwa budaya organisasi pemerintah yang inklusif dan partisipatif mampu memperkuat efektivitas kebijakan publik (Frinaldi et al., 2024; Mubarak et al., 2024; Frinaldi et al., 2025). Hal ini memperluas makna inovasi birokrasi dari sekadar efisiensi administratif menjadi transformasi sosial yang kolaboratif.

Selain itu, dinamika hubungan antara pemerintah dan warga negara juga menjadi tema penting yang menguat dalam literatur. Penelitian yang menelaah hubungan pemerintah–warga dari perspektif hukum administrasi dan keputusan tata usaha negara menunjukkan bahwa inovasi birokrasi harus diiringi dengan budaya organisasi yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara (Rezeki & Frinaldi, 2025). Budaya organisasi yang responsif terhadap aspirasi publik akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus meminimalkan konflik administratif. Hal ini sejalan dengan temuan mengenai pentingnya interaksi sosial dan pemahaman budaya dalam meningkatkan kualitas hubungan antara aparatur dan masyarakat (Rezeki et al., 2023).

Meskipun literatur menunjukkan perkembangan yang kaya dan beragam, hasil analisis bibliometrik mengonfirmasi bahwa kajian mengenai budaya organisasi dan inovasi birokrasi sektor publik masih bersifat terfragmentasi. Sebagian besar penelitian berfokus pada studi kasus sektoral atau regional tertentu tanpa mengaitkannya dalam kerangka konseptual yang lebih luas (Atikasari & Karsinah, 2022; Chisnullah & Meirinawati, 2022). Selain itu, penelitian bibliometrik sebelumnya lebih banyak digunakan untuk memetakan kepemimpinan atau manajemen secara umum, belum secara spesifik mengintegrasikan

budaya organisasi dan inovasi birokrasi sektor publik (Khasbulloh et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya celah konseptual dalam sintesis tema dan arah perkembangan penelitian

## Kesimpulan

Budaya organisasi memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam mendorong inovasi birokrasi sektor publik, terutama dalam menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin kompleks dan dinamis. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini memberikan kontribusi penting dengan menyajikan pemetaan tematik yang komprehensif mengenai peran budaya organisasi dalam mendorong inovasi birokrasi sektor publik. Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkaya kajian administrasi publik dengan mengintegrasikan perspektif budaya organisasi, inovasi, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan organisasi publik dalam merancang strategi pengembangan budaya organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada inovasi berkelanjutan (Yulistivira et al., 2023; Oktawiana & Handayani, 2024). Dengan demikian, transformasi birokrasi di Indonesia tidak hanya berfokus pada perubahan struktural, tetapi juga pada pembaruan nilai dan perilaku organisasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Hasil sintesis literatur dan analisis bibliometrik menunjukkan bahwa nilai-nilai organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembelajaran secara konsisten berkorelasi dengan keberhasilan inovasi kebijakan, layanan publik, dan transformasi digital pemerintahan. Pemetaan tema penelitian juga mengungkap bahwa kajian terdahulu masih bersifat terfragmentasi dan belum memberikan gambaran konseptual yang terintegrasi mengenai hubungan budaya organisasi dan inovasi birokrasi. Oleh karena itu, artikel ini berkontribusi dalam memperjelas tren, kluster tema, dan arah pengembangan penelitian, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi penguatan reformasi birokrasi berbasis budaya organisasi yang inovatif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Ariska, N., Helpiastuti, S., & Suharsono, A. (2023). Inovasi proses pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. *E-Sospol*, 10(2), 131. <https://doi.org/10.19184/e-sospol.v10i2.40111>
- Asmawati, N., Suparman, S., & Gunawan, H. (2024). Analisis implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah pada perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1308–1314. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3376>
- Asniati, A., Muchlis, S., & Jannah, R. (2023). Kajian konsep amanah dalam membentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Studi pada Pemerintah Desa Je'netallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Akunsyah)*, 3(1), 11–22. <https://doi.org/10.30863/akunsyah.v3i1.4787>

- Atikasari, H., & Karsinah, K. (2022). Urgensi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) guna mewujudkan birokrasi ideal. *Jurnal Bina Desa*, 4(1), 149–156. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i1.32684>
- Chisnullah, M., & Meirinawati, M. (2022). Kualitas pelayanan Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. *Publika*, 937–952. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p937-952>
- Costari, N., & Belinda, P. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v1i1.421](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421)
- Fathony, A. A., & Agusta, A. R. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.821>
- Frinaldi, A., Afdalisma, A., Rezeki, A. P. T., & Saputra, B. (2024, November). Digital transformation of government administration: Analysis of efficiency, transparency, and challenges in Indonesia. In *IAPA Proceedings Conference* (pp. 82–101). <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1096>
- Frinaldi, A., Mubarak, A., Rezeki, A. P. T., Rista, M., Helmi, R. F., & Wilis, R. (2024). Analysis of community-based sanitation implementation in Pariaman City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1414(1), 012081. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1414/1/012081>
- Frinaldi, A., Mubarak, A., Renaldi, I., Saputra, B., Rezeki, A. P. T., Afdalisma, & Syolendra, D. F. (2025). Developing local initiatives for waste management: A community empowerment approach in Sungai Batang Village, Maninjau. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1556(1), 012077. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1556/1/012077>
- Frinaldi, A., Vanny, D., & Rezeki, A. P. T. (2025). Multidimensional collaboration in post-disaster recovery: The role of international NGOs and local CSOs in Agam Regency, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 677, 02006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202567702006>
- Khasbulloh, M., Suzano, R., Rukmana, A., & Mesra, R. (2023). Peta keterkaitan konsep dalam penelitian kepemimpinan kewirausahaan: Analisis bibliometrik dan co-occurrence. *Sanskara Manajemen dan Bisnis*, 1(3), 217–228. <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.219>
- Lestari, E., Marliyati, M., & Farizi, M. (2024). Analisis determinan kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. *Accounting Global Journal*, 8(1), 14–35. <https://doi.org/10.24176/agj.v8i1.11307>
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. <https://doi.org/10.31002/jkkm.v2i1.758>
- Nursanty, I., Minarni, M., Fauzi, A., Maqsudi, A., Anwar, A., Rachmawati, T., & Febrianty, F. (2022). Akuntansi manajemen. <https://doi.org/10.31237/osf.io/9x6p7>
- Oktawiana, R., & Handayani, D. (2024). Pengaruh opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah

- daerah di Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 117–131. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1196>
- Putra, A., Rezeki, T., Fitriasia, A., & Fatimah, S. (2025). Transformasi taksonomi ilmu administrasi negara dalam merespons environmental informatics di era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 13993–14000.
- Rezeki, A. P. T., & Frinaldi, A. (2024). Strategi pemerintahan daerah Kota Padang Panjang dalam menjaga keberlanjutan lahan dan pangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN*, 12(2), 204–214. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i2.250>
- Rezeki, A. P. T., & Frinaldi, A. (2025). The dynamics of the relationship between government and citizens from the perspective of administrative court decisions. *Santhet (Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah)*. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/5687>
- Rezeki, T., Putra, A., Pratiwi, L. P., Handriyani, R., & Rinaldo, A. (2023). Peranan interaksi sosial dalam meningkatkan pemahaman budaya antar mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. *Journal of Comprehensive Science*, 2(7). <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.432>
- Sancoko, B. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2020.008.01.05>
- Setyawan, I., & Rahmawati, A. (2023). Analisis implementasi program Dukcapil Smart sebagai inovasi pelayanan publik di Kabupaten Bantul. *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 11(1), 91–110. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.7144>
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan dan Politik*, 5(2), 63–72. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.679>
- Wiryanto, W. (2021). Pengembangan tipologi inovasi pelayanan publik. *Inovasi*, 18(1), 21–34. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v18i1.302>
- Yulistivira, A., Ariany, R., & Putera, R. (2023). Inovasi pelayanan kesehatan berbasis mobile cegah stunting (Ayo Ceting). *Jurnal Publik*, 17(1), 16–28. <https://doi.org/10.52434/jp.v17i01.181>